



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN

TAHUN 2025

KUALA PEMBUANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya mengimplementasikan proses demokrasi yang berwibawa, berdasarkan aspek-aspek transparansi, akuntabel, efektif dan efisien dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Seruyan harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (LKjIP BAPPEDALITBANG) Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BAPPEDALITBANG selama tahun anggaran 2025. Laporan ini disusun dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan LKjIP BAPPEDALITBANG ini dapat memberikan informasi yang diharapkan dan manfaat bagi seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan di tahun 2025. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Seruyan

Kuala Pembuang, 6 Pebruari 2026

Kepala



RUDI PURWANTO, S.P.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660303 199203 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2. Susunan Kepegawaian.....	13
1.3. Isu Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan.....	14
1.4. Sistematika LKjIP	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)	16
2.2. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja BAPPEDALITBANG	34
3.3. Keberhasilan dan Hambatan	44
3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan.....	45
3.5. Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan)	49
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG.....	12
Tabel 1.3.	SDM BAPPEDALITBANG Tahun 2025	13
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RENSTRA BAPPEDALITBANG 2024-2026	17
Tabel 2.1.2	Sasaran, Indikator, Strategi, Arah Kebijakan dan Program RENSTRA BAPPEDALITBANG 2024-2026	18
Tabel 2.2.	Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Perjanjian Kinerja) BAPPEDALITBANG Tahun 2025.....	20
Tabel 2.2.1	Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja) BAPPEDALITBANG Tahun 2025	21
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Tahun 2025.....	34
Tabel 3.2.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3.2.1.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	35
Tabel 3.2.2.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	35
Tabel 3.2.3.	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 1	36
Tabel 3.2.4.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2.....	37
Tabel 3.2.5.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	39
Tabel 3.2.6.	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 2	40
Tabel 3.2.7.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3.....	41
Tabel 3.2.8.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	42
Tabel 3.2.9.	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 3	43
Tabel 3.3.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Keuangan	45
Tabel 3.4.	Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan)	52

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta penelitian dan pengembangan daerah selama tahun anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan serta dokumen perencanaan daerah yang berlaku, sebagai wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada LKjIP tahun 2025 ini penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan atas pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2025 dilakukan secara keseluruhan terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam berbagai Aspek Pembangunan.

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari seluruh komponen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan dalam memberikan kontribusi guna tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan kinerja dari sasaran strategis tersebut maka BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025 didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp.11.834.833.344,00** (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi anggaran tahun 2025 sebesar **Rp.10.133.383.753,00** (Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar **85,62%**. Sedangkan sisa anggaran sebesar **Rp 1.701.449.591,00** (Satu Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau **14,38%** telah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Seruyan.

Laporan ini dibuat dengan harapan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan kedepan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDALITBANG Tahun Anggaran 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu laporan kinerja juga digunakan untuk mengukur dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bappedalitbang Kabupaten Seruyan tahun 2025, maka disusunlah LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDALITBANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dengan Tipe A.

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

- a. Mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencanapembangunan Daerah;
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
- c. Menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- f. Bidang Riset Dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;

- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- f) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
- j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
- k) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- c) Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d) Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e) Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- i) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- j) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahkan:

- 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsisebagai berikut:

- a) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
- f) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- h) Penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada KepalaBadan;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah;
- j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;

- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan.
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur.

6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan

Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

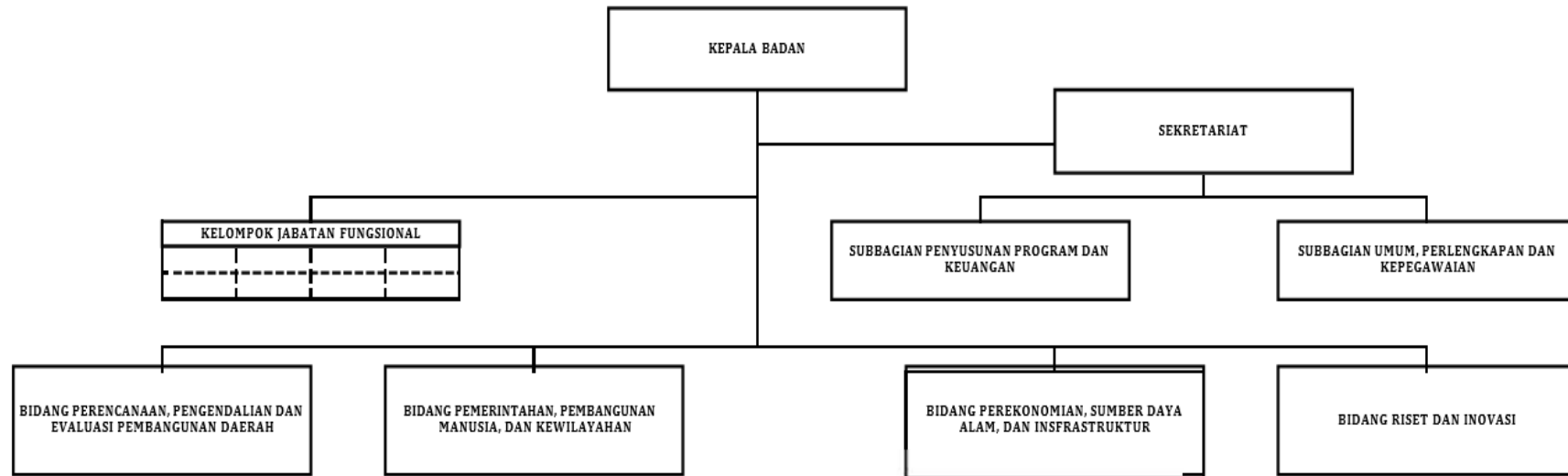
- a) Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b) Penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;
- c) Pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- e) Perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- f) Pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - 1. Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- g. Kelompok Jabatan
- o Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

- Jabatan Pelaksana

Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN**



1.2. Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas/fungsi suatu organisasi. Dalam hal ini ketersediaan SDM BAPPEDALITBANG yang berkualitas sebagai lingkungan strategis internal dapat diidentifikasi sebagai strength (kekuatan). Hal ini tercermin pada tahun 2025 terdaftar 68 orang pegawai di lingkungan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dengan komposisi 58 orang ASN atau 85,29% personil yang terdiri dari PNS dan PPPK (Penuh dan Paruh Waktu) dan 10 orang tenaga Non ASN atau 14,71% personil yang terdiri dari Tenaga Kebersihan dan Penjaga Kantor dengan tingkat pendidikan mulai SD sampai dengan Strata-II (S-2) dan klasifikasi golongan/ruang sebagaimana disajikan tabel 1.3 sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia (SDM)
BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

Golongan/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D1	D3/D4	S1	S2	
IVC	-	-	-	-	-	-	1	7
IVB	-	-	-	-	-	-	-	
IVA	-	-	-	-	-	1	5	
IIID	-	-	-	-	-	6	1	20
IIIC	-	-	-	-	-	3	2	
IIIB	-	-	-	-	-	1	-	
IIIA	-	-	2	-	-	5	-	
IID	-	-	-	-	1	-	-	6
IIC	-	-	4	-	1	-	-	
IIB	-	-	-	-	-	-	-	
IIA	-	-	-	-	-	-	-	
IX	-	-	-	-	-	3	-	3
VII	-	-	-	-	1	-	-	1
V	-	-	3	-	-	-	-	3
PPPK PW	-	-	13	-	-	5	-	18
Non ASN	4	2	4	-	-	-	-	10
Jumlah	4	2	26	-	3	24	9	68

Sumber : Bapperida Kabupaten Seruyan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3. jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan ASN, didominasi oleh golongan dan pangkat Penata Tk. I (III/d) berjumlah 7 orang atau 17,50% dari seluruh jumlah ASN. Selanjutnya golongan dan pangkat Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang atau 15%,

diikuti Penata (III/c), Penata Muda (III/a) dan pangkat Pengatur (II/c) masing-masing sebanyak 5 orang atau 12,50%. Golongan IX dan V masing-masing sebanyak 3 orang atau 7,50%. Selanjutnya Pembina Utama Muda (IV/c), Penata Muda Tk. I (III/b), Pengatur Tk. I (II/d) dan golongan VII masing-masing sebanyak 1 orang atau 2,50% dari total ASN.

Pada Tahun 2025 seluruh posisi jabatan eselon II, III dan IV di BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan telah terisi ditambah dengan 17 PNS dan PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional yaitu Fungsional Perencana, Peneliti, Perekayasa, Analis Kebijakan dan Arsiparis. Untuk posisi pegawai berstatus Non ASN di tahun 2025 berjumlah 10 orang, dengan posisi personil sebagai berikut:

Sopir	= - Orang
<i>Cleaning Service</i> dan Tukang Kebun	= 8 Orang
Penjaga Siang/Malam	= 2 Orang

I.3. Isu Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan sebagai koordinator perencanaan pembangunan dan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, memiliki berbagai masalah internal dan eksternal yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

1. Belum optimalnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
3. Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
4. Belum optimalnya penerapan dan pengelolaan Teknologi Informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah secara internal dan secara eksternal.
6. Terbatasnya sumber daya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan terbatasnya kuantitas formasi aparatur perencana di BAPPEDALITBANG sesuai dengan struktur perangkat daerah.

7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

I.4. Sistematika LKjIP

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan penjelasan umum dan dengan penekanan kepada aspek-aspek strategis serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan akuntabilitas kinerja tahun 2025, ditinjau dari hasil pengukuran capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2025 sepenuhnya menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Seruyan dengan mempedomani pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Adapun dasar rujukan/pedoman dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai target kinerja dan pagu anggaran ialah Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 yang kemudian diterjemahkan dalam Perubahan Renja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dan dilaksanakan melalui DPPA BAPPEDALITBANG Tahun 2025.

Keterkaitan dan keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut diatas harus terjaga sehingga ada konsistensi antara apa yang direncanakan, kinerja, target kinerja, dan pagu dengan realisasinya. Hal terpenting yang perlu ditekankan ialah bukan hanya apakah pagu anggaran yang telah direncanakan dapat terserap seluruhnya, namun yang lebih penting lagi adalah apakah kinerja dan target yang telah ditetapkan telah tercapai secara efektif dan efisien dalam suatu kerangka pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya kinerja yang telah ditetapkan, maka disusunlah Perencanaan Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dengan mempedomani Tujuan dan Sasaran pada Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD periode berkenaan dan bersifat indikatif.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima 5 tahun mendatang. Pada tahun 2023 Kabupaten Seruyan telah menetapkan Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan dan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama periode transisi masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Seruyan yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, termasuk Bappedalitbang Kabupaten Seruyan.

Pada Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 mempunyai 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sasaran perencanaan jangka menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam berbagai Aspek Pembangunan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang pada RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan mendukung perwujudan tujuan ke-3 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sasaran ke-6 yaitu meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKJIP Bappedalitbang	B (60,50)	B (63,1)	B	B	B

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pelaksanaan pembangunan daerah		Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	89,47%	95,85%	100%	100%	100%
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	93,14%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	0%	80%	80%	80%

Sumber : Renstra Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Secara singkat, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pada Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 maka ditetapkan strategi, arah kebijakan dan program sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2 Sasaran, Indikator, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	Penguatan manajemen kinerja organisasi	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan dukungan pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	
Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan	Menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Penerapan perencanaan dan penganggaran terpadu	Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dengan optimalisasi dan pengembangan <i>e-planning</i> dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Optimalisasi dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Melaksanakan pemutakhiran dan penyajian data secara berkala (<i>continue</i>) dan akurat	
		Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan dan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan Perangkat Daerah, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana Perangkat Daerah	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan dan prioritas daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber : Renstra Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

II.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan telah menerapkan target kinerja Tahun 2025 dengan mempedomani Renstra pada tahun

berkenaan. Adapun target pencapaian kinerja utama Bappeda dan Litbang tahun 2025 tergambar dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Perjanjian Kinerja)
BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	100%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$	80%

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2025

Adapun keseluruhan target pencapaian kinerja BAPPEDALITBANG dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1. Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja) BAPPEDALITBANG Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappeda	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.458.666.300,00	9.397.643.800,00	9.168.275.644,00
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		74.682.000,00	74.682.000,00	52.488.000,00
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.742.000,00	25.742.000,00	25.822.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.710.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.710.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.140.000,00	3.140.000,00	4.280.000,00
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.660.000,00	32.660.000,00	7.826.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.345.468.236,00	5.966.307.736,00	5.194.770.080,00

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.191.512.248,00	5.848.471.748,00	5.069.604.092,00
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.415.988,00	112.295.988,00	116.375.988,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.540.000,00	5.540.000,00	8.790.000,00
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		252.380.000,00	191.064.000,00	137.199.000,00
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.920.000,00	44.280.000,00	41.820.000,00
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.537.000,00	40.861.000,00	37.676.000,00
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	105.923.000,00	105.923.000,00	57.703.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.026.276.400,00	1.030.760.400,00	1.003.972.850,00
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.547.000,00	25.497.000,00	25.444.450,00

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.421.400,00	160.996.400,00	162.046.400,00
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.384.000,00	15.384.000,00	15.529.000,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.313.000,00	196.233.000,00	196.233.000,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.900.000,00	76.900.000,00	76.900.000,00
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.650.000,00	11.650.000,00	10.150.000,00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.805.000,00	26.805.000,00	26.805.000,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.256.000,00	517.295.000,00	490.865.000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		470.858.800,00	747.918.800,00	1.372.375.800,00
						Pengadaan Mebel	98.484.000,00	98.484.000,00	98.484.000,00
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	372.374.800,00	649.434.800,00	1.273.891.800,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		749.570.864,00	749.570.864,00	608.089.914,00
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.202.400,00	158.202.400,00	147.938.850,00

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.368.464,00	591.368.464,00	460.151.064,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		533.920.000,00	631.830.000,00	793.870.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.680.000,00	76.680.000,00	76.680.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.870.000,00	215.870.000,00	215.870.000,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.780.000,00	85.780.000,00	83.280.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.590.000,00	253.500.000,00	418.040.000,00
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			2.348.344.700,00	1.918.532.700,00	1.705.694.700,00

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.843.615.700,00	1.665.169.700,00	1.439.231.700,00
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	211.226.100,00	182.412.100,00	161.062.100,00
						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	194.818.900,00	167.224.900,00	138.964.900,00
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	253.622.400,00	218.400.400,00	208.760.400,00
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	42.730.000,00	36.279.000,00	27.679.000,00
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.141.218.300,00	1.060.853.300,00	902.765.300,00
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		159.729.000,00	73.125.000,00	86.225.000,00
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	54.192.000,00	19.469.000,00	15.269.000,00
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	105.537.000,00	53.656.000,00	70.956.000,00

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		345.000.000,00	180.238.000,00	180.238.000,00
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota	151.300.000,00	90.808.000,00	93.518.000,00
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	193.700.000,00	89.430.000,00	86.720.000,00
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1.350.146.000,00	740.813.000,00	743.453.000,00
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		588.175.000,00	360.452.000,00	360.096.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.422.000,00	72.820.000,00	72.820.000,00

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	140.421.000,00	71.287.000,00	94.447.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.868.000,00	47.733.000,00	47.497.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.150.000,00	3.150.000,00	3.386.000,00

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	204.964.000,00	137.112.000,00	113.596.000,00
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		380.734.000,00	202.608.000,00	166.477.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.863.000,00	70.106.000,00	61.210.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.150.000,00	3.150.000,00	1.650.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	64.135.000,00	24.783.000,00	19.624.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.068.000,00	40.481.000,00	33.682.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.150.000,00	3.150.000,00	1.650.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	96.168.000,00	35.738.000,00	23.461.000,00
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		381.237.000,00	177.753.000,00	216.880.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.792.000,00	40.515.000,00	33.038.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.150.000,00	3.150.000,00	1.650.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	113.179.000,00	37.665.000,00	85.413.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.228.000,00	42.443.000,00	42.443.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	77.538.000,00	25.630.000,00	25.986.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			440.000.000,00	209.916.000,00	217.410.000,00
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		100.000.000,00	62.474.000,00	62.474.000,00
						Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000,00	62.474.000,00	62.474.000,00
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		80.000.000,00	40.202.000,00	-
						Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	80.000.000,00	40.202.000,00	-
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		80.000.000,00	41.236.000,00	48.436.000,00
						Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	80.000.000,00	41.236.000,00	48.436.000,00
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi		180.000.000,00	66.004.000,00	106.500.000,00

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Pergeseran	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	70.000.000,00	39.902.000,00	100.000.000,00
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	30.000.000,00	19.602.000,00	-
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	80.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Total Anggaran						13.597.157.000,00	12.266.905.500,00	11.834.833.344,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah (PD) dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat. BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja telah dilaksanakan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan
Tahun 2025

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B	B (62,10)	100%	Tercapai
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	99,10%	99,10%	Sangat Tinggi
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	60%	75%	Rendah

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, Capaian IKU BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan rata-rata hampir mencapai 100%, sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi perencanaan-penganggaran menunjukkan capaian sangat baik, dengan sebagian besar indikator mencapai atau mendekati target yang ditetapkan. Indikator nilai LKjIP dan konsistensi RKPD ke APBD mencapai 100%, sedangkan konsistensi RPJMD ke RKPD mencapai 99,10%. Sementara itu, indikator pemanfaatan hasil kelitbangan baru mencapai 75%, sehingga masih memerlukan upaya peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan daerah.

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja BAPPEDALITBANG

Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan memberikan peringkat/kategori capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

Tabel 3.2.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Berdasarkan tabel 3.1, terdapat 3 sasaran strategis dan 4 indikator sasaran (indikator kinerja) dengan analisa dan evaluasi masing-masing sasaran dengan pencapaian indikator kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sasaran 1:

Tabel 3.2.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B	B (62,10)

Nilai SAKIP Bappedalitbang Tahun 2025 ditargetkan sebesar B dan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terealisasi sebesar B dengan angka 62,10 sehingga capaian kinerja indikator mencapai 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Bappedalitbang telah berjalan dengan baik, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Nilai LKjIP BAPPEDALITBANG	B	B (62,10)	100%

Indikator Nilai SAKIP Bappedalitbang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar B dan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) terealisasi sebesar B dengan nilai 62,10, sehingga capaian kinerja mencapai 100% atau sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya nilai SAKIP sesuai target, maka indikator kinerja Renstra Bappedalitbang Tahun 2025 dapat dinyatakan **tercapai**. Hal ini mencerminkan konsistensi penerapan SAKIP serta keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian target kinerja sasaran 1 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan utamanya adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, RKA, DPA, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan pendukung/penunjang terdiri dari 7 kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 23 sub kegiatan rutin di dalamnya yang dilaksanakan oleh bagian Sekretariat BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan. Peran dan fungsi kesekretariatan organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan adalah mendukung operasional seluruh perangkat organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Tabel 3.2.3
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Nilai LKjIP BAPPEDALITBANG	B (63,1)	B (61,85)	B (62,10)

Pada Tabel 3.2.3 terlihat perkembangan nilai SAKIP Bappedalitbang selama tahun 2023–2025 menunjukkan capaian yang relatif stabil pada predikat B, dengan nilai sebesar 63,10 pada tahun 2023, menurun menjadi 61,85 pada tahun 2024 dan meningkat kembali menjadi 62,10 pada tahun 2025. Fluktuasi nilai tersebut mencerminkan bahwa implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan cukup baik namun masih memerlukan penguatan, terutama pada kualitas perumusan indikator kinerja yang berorientasi outcome, keterkaitan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam perbaikan kinerja. Peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam penyelarasan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, meskipun secara umum capaian akuntabilitas kinerja masih berada pada kategori baik (predikat B), sehingga diperlukan upaya peningkatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan melalui penguatan cascading kinerja, evaluasi internal, integrasi sistem kinerja serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SAKIP.

2. Sasaran 2:

Tabel 3.2.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Kriteria
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	99,10%	Sangat Tinggi
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	Sangat Tinggi

Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun melalui rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD mencapai tingkat konsistensi sebesar 99,10%. Realisasi kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perhitungan data kinerja dijabarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\% ; \frac{220}{222} \times 100\% = 99,10\%$$

Jumlah Program RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	53	
	$\times 100\%$;	$\frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	53	
Jumlah Program RKPD Bidang Perekonomian dan SDA Tahun Berkenaan	58	
	$\times 100\%$;	$\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	58	
Jumlah Program RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	109	
	$\times 100\%$;	$\frac{109}{111} \times 100\% = 98,19\%$
Jumlah Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	111	

- Indikator Kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD mencapai tingkat konsistensi sebesar 100%. Realisasi kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perhitungan data kinerja dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan	220	
	$\times 100\%$;	$\frac{220}{220} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program RKPD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	220	
Jumlah Program APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	53	
	$\times 100\%$;	$\frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program Dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	53	
Jumlah Program APBD Bidang Perekonomian dan SDA Tahun Berkenaan	58	
	$\times 100\%$;	$\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program Dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	58	
Jumlah Program APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	109	
	$\times 100\%$;	$\frac{109}{109} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program Dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	109	

Tabel 3.2.5
Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	99,10%	99,10%
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%

Perhitungan Capaian Kinerja

$$\begin{aligned} \text{Indikator 1 : } & \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{99,10}{100} \times 100\% = 99,10\% \\ \text{Indikator 2 : } & \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Hasil capaian kinerja sasaran renstra KEDUA terdiri dari capaian dua jenis indikator kinerja yang dilaksanakan oleh tiga Bidang di BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2025 yaitu Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur. Indikator persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke RKPD pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,10%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,10% dengan kategori **sangat tinggi**. Sementara itu, indikator persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke APBD ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah telah berjalan selaras dan terintegrasi antar dokumen perencanaan daerah. Tingginya konsistensi RKPD ke APBD mencerminkan bahwa program yang direncanakan dalam RKPD secara keseluruhan telah terakomodir dalam APBD. Adapun selisih kecil pada konsistensi RPJMD ke RKPD disebabkan oleh adanya penyesuaian prioritas pembangunan tahunan dan dinamika kebutuhan daerah, namun secara umum keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masing-masing bidang terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan

di RPJMD/RPD, RKPD dan APBD Perangkat Daerah tahun 2025 hampir memenuhi target konsistensi rata-rata mencapai 100%.

Tabel 3.2.6
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	95,85%	99,55%	99,10%
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan indikator persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke RKPD selama tahun 2023–2025 menunjukkan peningkatan signifikan dari 95,85% pada tahun 2023 menjadi 99,55% pada tahun 2024, dan relatif stabil tinggi pada 99,10% pada tahun 2025. Peningkatan tajam pada tahun 2024 mencerminkan semakin baiknya penyelarasan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan daerah, khususnya melalui penguatan proses verifikasi dan sinkronisasi program dalam penyusunan RKPD. Penurunan kecil sebesar 0,45 poin pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya penyesuaian prioritas pembangunan tahunan serta dinamika kebutuhan daerah, namun secara substantif keterkaitan program RPJMD dalam RKPD tetap sangat tinggi dan berada pada kategori sangat baik.

Sementara itu, indikator persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke APBD selama periode 2023–2025 menunjukkan capaian 100% setiap tahun, yang menandakan bahwa seluruh program yang direncanakan dalam RKPD secara konsisten terakomodir dalam dokumen penganggaran daerah. Konsistensi penuh ini mencerminkan kuatnya integrasi proses perencanaan dan penganggaran daerah, efektifitas mekanisme pengendalian dan verifikasi perencanaan, serta optimalnya koordinasi antara perangkat daerah perencana dan pengelola keuangan daerah dalam hal ini Bappedalitbang dan BKAD. Secara keseluruhan, kinerja konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah selama tiga tahun terakhir berada pada kondisi sangat baik dan stabil, menunjukkan

kematangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin terintegrasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan konsistensi tersebut antara lain melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah setiap tahun agar tetap mengacu pada RPJMD/RPD, pelaksanaan forum koordinasi perencanaan dan penganggaran secara berkala, review dan verifikasi dokumen perencanaan sebelum penetapan RKPD, serta penguatan pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah. Selain itu, dilakukan pula pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan agar selaras dengan sasaran dan arah kebijakan RPJMD/RPD. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif dalam menjaga keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan dan penganggaran daerah, sehingga konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada tahun 2025 dapat dipertahankan pada kategori sangat baik.

3. Sasaran 3:

Tabel 3.2.7
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	60%

Indikator kinerja persentase hasil kajian kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 60%, sehingga capaian kinerja mencapai 75% dengan kategori **sedang**. Program pendukung dari indikator kinerja sasaran 3 menjadi tanggung jawab Bidang Riset dan Inovasi Daerah meliputi 1 program penelitian dan pengembangan daerah dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang telah dilaksanakan}} \times 100\% = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

Sepanjang Tahun 2024-2025 BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah telah melaksanakan 5 kajian yaitu Kajian Survey dan Pemetaan Wilayah Persawahan di Kecamatan Seruyan Hilir, Kajian Survey dan Pemetaan Menara Telekomunikasi Kabupaten Seruyan, Kajian Struktur Rantai Pasok Beras, Penetapan dan Peta Sebaran Komoditas Unggulan Pertanian untuk Pembangunan Ekonomi Kabupaten Seruyan dan Strategi Pengembangan Kelapa dan Nipah di Kabupaten Seruyan. Di antara 5 kajian yg sudah dilaksanakan, terdapat 3 kajian yang dimanfaatkan yaitu Kajian Struktur Rantai Pasok Beras, Penetapan dan Peta Sebaran Komoditas Unggulan Pertanian untuk Pembangunan Ekonomi Kabupaten Seruyan dan Strategi Pengembangan Kelapa dan Nipah di Kabupaten Seruyan.

Tabel 3.2.8

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
3	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	60%	75%

Perhitungan Capaian Kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{60}{80} \times 100\% = 75\%$$

Pada indikator kinerja sasaran TIGA (3) Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah di tahun 2025 ditetapkan target sebesar 80% dengan realisasi sebesar 60%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 75% dan termasuk kategori **sedang**. Capaian ini menunjukkan bahwa hasil-hasil kelitbangan telah mulai digunakan sebagai referensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, namun tingkat pemanfaatannya masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya kesesuaian antara topik kajian dengan kebutuhan prioritas perangkat daerah serta terbatasnya internalisasi rekomendasi penelitian ke dalam dokumen perencanaan dan program perangkat daerah. Dengan demikian, diperlukan penguatan pada tahap perencanaan kajian yang lebih berbasis kebutuhan pembangunan,

peningkatan komunikasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan, serta dorongan pemanfaatan rekomendasi kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan agar kontribusi penelitian terhadap pembangunan daerah dapat meningkat pada periode berikutnya.

Tabel 3.2.9
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
3	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	0%	0%	75%

Dari tabel 3.2.9 terlihat bahwa perkembangan indikator persentase pemanfaatan hasil kajian kelitbangan oleh perangkat daerah selama periode 2023–2025 menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2023 dan 2024 indikator ini belum menunjukkan capaian (0%), yang mencerminkan bahwa hasil kajian penelitian dan pengembangan pada periode tersebut belum terimplementasi atau belum teridentifikasi pemanfaatannya dalam kebijakan maupun program perangkat daerah. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya keterkaitan tema penelitian dengan kebutuhan perangkat daerah, belum terbangunnya mekanisme pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan daerah, terbatasnya anggaran pada Perangkat Daerah serta belum optimalnya proses diseminasi dan koordinasi pemanfaatan hasil kajian.

Pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian yang sangat signifikan menjadi 75%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar hasil kajian kelitbangan telah mulai dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola kelitbangan daerah, khususnya melalui penyusunan tema penelitian yang lebih berbasis kebutuhan pembangunan, pelaksanaan diseminasi hasil kajian kepada perangkat daerah, serta dorongan integrasi rekomendasi penelitian ke dalam dokumen perencanaan dan program pembangunan. Secara keseluruhan, tren kinerja indikator ini menunjukkan pergeseran dari kondisi belum termanfaatkan menuju pemanfaatan yang cukup baik, sehingga memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pembangunan daerah.

3.3. Keberhasilan dan Hambatan

Secara umum, target kinerja sasaran strategis organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2025 seluruhnya hampir mencapai target. Tidak hanya kinerja sasaran (impact) namun juga kinerja outcome hampir seluruhnya tercapai. Ada beberapa faktor penting yang menjadi pemicu keberhasilan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan sebagai organisasi dalam mencapai target-target kinerja ditahun 2025 antara lain:

1. Selalu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perencanaan pembangunan;
2. Komitmen dan semangat yang jelas dari ASN dilingkungan BAPPEDALITBANG terkait pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dilingkungan BAPPEDALITBANG dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan;
4. Adanya pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi yang masuk hampir disemua lini tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG mulai dari sistem informasi perencanaan, data dan lain sebagainya.

Adapun faktor yang relatif menghambat dalam pencapaian target kinerja BAPPEDALITBANG tahun 2025 antara lain:

1. Komposisi pegawai dan jabatan dilingkungan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dirasa kurang dan belum cukup ideal mengingat besarnya urusan yang diemban yaitu tidak hanya urusan perencanaan pembangunan namun juga urusan penelitian dan pengembangan;
2. Jumlah ASN yang kompeten dalam bidang perencanaan belum maksimal dan dirasa masih terlalu sedikit. Selain itu kompetensi ASN dibidang kelitbangan, riset dan inovasi daerah dirasa masih kurang. Hal ini terutama disebabkan oleh sedikitnya jumlah jabatan fungsional peneliti dan perekayasa pada Bappedalitbang Kabupaten Seruyan;
3. Tercapai tidaknya target kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, namun faktor eksternal juga sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran strategis organisasi. Faktor eksternal yang cukup signifikan salah satunya adalah masih cukup banyaknya perencana di Perangkat Daerah lain yang belum sepenuhnya paham akan suatu mekanisme proses perencanaan

dan penganggaran. Hal ini membuat BAPPEDALITBANG harus menggunakan *effort* lebih dari 100% agar target sasaran strategis BAPPEDALITBANG khususnya terkait Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah bisa mencapai target.

Berdasarkan beberapa kendala dan hambatan utama tersebut, solusi yang (perlu) dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sejalan dengan itu juga mulai diusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan kepada perangkat daerah yang membidangi yaitu BKPSDM Kabupaten Seruyan.
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat khususnya terkait perencanaan dan kelitbangan. Selain itu juga mengusulkan agar diadakan lebih banyak lagi jabatan fungsional peneliti dan perekayasa.
3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi terus menerus terkait proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada semua pihak.
4. Melakukan koordinasi terus kepada produsen data perencanaan dan kelitbangan agar dapat menghasilkan data yang valid, *up to date*, berkesinambungan.

3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Capaian kinerja Bappedalitbang tahun 2025 per sasaran tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahunan	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	95,19%	9.168.275.644,00	8.393.285.209,00	91,55%
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	99,10%	1.705.694.700,00	968.064.610,00	56,75%

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahunan	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada			
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	743.453.000,00	588.118.299,00	79,11%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%			
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%			
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%			
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	98,20%			

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahunan	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%			
		Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada			
		Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	50%	93,00%			
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80%	60,00%	217.410.000,00	183.915.635,00	84,59%
		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	80%	100%			
		Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	80%	100%			
		Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	80%	92,31%			
		Jumlah Belanja Daerah		96,54%	11.834.833.344,00	10.133.383.753,00	85,62%

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Seruyan (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja Bappedalitbang Tahun 2025 dipengaruhi oleh pelaksanaan empat program utama yang mendukung sasaran strategis perangkat daerah. Secara umum, sebagian besar program menunjukkan realisasi kinerja tinggi dan didukung oleh serapan anggaran yang cukup efisien, meskipun masih terdapat program dengan capaian belum optimal.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan kontribusi terhadap sasaran meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah melalui penyediaan layanan administrasi perkantoran. Indikator persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran terealisasi 95,19% dari target 100% dengan serapan anggaran sekitar 91,54%. Program ini menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan dan

pelaporan kinerja sehingga mendukung tercapainya nilai SAKIP predikat B.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan program utama yang menunjang sasaran konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah. Indikator konsistensi RPJMD ke RKPD tercapai 99,10% dan RKPD ke APBD 100%, serta seluruh dokumen perencanaan daerah tersedia dan ditetapkan. Dengan serapan anggaran sekitar 56,76%, program ini efektif menghasilkan capaian sangat tinggi melalui kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah juga berkontribusi signifikan terhadap sasaran konsistensi perencanaan. Hampir seluruh indikator bidang mencapai 100% kecuali konsistensi RPJMD–RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan sebesar 98,20%. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW mencapai 93% dari target 50%, menunjukkan sinkronisasi spasial sangat baik. Dengan serapan anggaran sekitar 79,11%, program ini efektif menjaga keterpaduan perencanaan sektoral dan kewilayahan melalui proses koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi serta menjaga sinergitas terhadap dokumen perencanaan.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah belum optimal mendukung sasaran pemanfaatan hasil kelitbangan. Indikator pemanfaatan hasil kelitbangan hanya 60% dari target 80% meskipun indikator lain seperti implementasi rencana kelitbangan dan fasilitasi inovasi mencapai 100%, serta kebijakan inovasi 92,31%. Dengan serapan anggaran sekitar 84,59%, kendala lebih disebabkan relevansi tema penelitian, integrasi hasil kajian dalam perencanaan, serta diseminasi yang belum optimal.

Secara keseluruhan, keberhasilan kinerja terutama ditunjang oleh program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Adapun belum optimalnya capaian pemanfaatan hasil kelitbangan disebabkan keterbatasan kontribusi program penelitian dan pengembangan dalam mendorong penggunaan hasil kajian pada kebijakan dan perencanaan perangkat daerah. Diperlukan penajaman tema penelitian yang lebih aplikatif, kolaborasi dengan perangkat daerah sejak perencanaan kajian, serta penguatan diseminasi agar program kelitbangan lebih berkontribusi terhadap sasaran strategis.

3.5. Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan)

Pencapaian sasaran strategis (IKU) suatu organisasi tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada terutama sumber daya keuangan. Oleh karena itu sistem perencanaan dan penganggaran merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pembangunan dan perlu dievaluasi secara berkala penggunaan anggaran apakah sudah efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari aspek penganggaran tahun 2025 menurut APBD perubahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan memiliki anggaran sebesar Rp.11.834.833.344,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) untuk melaksanakan 4 jenis program, 17 kegiatan dan 66 sub kegiatan yang tertuang dalam DPA Perubahan.

Hasil pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan terealisasi sebesar Rp.10.133.383.753,00 (Sepuluh Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau terserap 85,62%. Jika dikaitkan dengan pencapaian target-target IKU BAPPEDALITBANG tahun 2025 yang capaiannya rata-rata sebesar 96,54%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran BAPPEDALITBANG tahun 2025 bisa dikatakan **Efektif** dan **Efisien**. Dikatakan efektif karena secara parsial target kinerja sasaran organisasi (IKU) hampir seluruhnya dapat dicapai dan dikatakan efisien karena untuk mencapai target-target IKU tersebut ada penghematan anggaran sebesar 14,38%. Evaluasi terhadap pelaksanaan program pada BAPPEDALITBANG menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja pada tahun 2025 berada pada kategori sangat baik. Hal ini terlihat dari mayoritas indikator program yang mencapai realisasi di atas 95% bahkan hingga 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mampu menghasilkan keluaran sesuai target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Dari sisi penggunaan anggaran, realisasi belanja BAPPEDALITBANG mencapai 85,62% dari pagu anggaran. Meskipun tidak seluruh anggaran terserap, sebagian besar target kinerja program tetap tercapai pada tingkat yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya efektif dalam mencapai sasaran, tetapi juga efisien dalam pemanfaatan sumber daya keuangan. Perlu dipahami bahwa

sisanya lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang terjadi tidak selalu bermakna negatif. SiLPA dapat mencerminkan efisiensi apabila dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang hemat biaya tanpa mengurangi target dan kualitas capaian kinerja. Dalam konteks ini, BAPPEDALITBANG mampu menghemat anggaran namun tetap mencapai hampir seluruh target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga SiLPA yang terjadi justru mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik dan berorientasi pada hasil.

Untuk melihat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran secara lebih rinci, maka perlu dilihat bagaimana target kinerja dan serapan anggaran masing-masing sub kegiatan di BAPPEDALITBANG tahun 2025. Dari 66 sub kegiatan, terdapat 16 sub kegiatan yang capaian realisasi keuangannya dibawah 70% antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
3. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota;
5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
8. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota;
9. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
11. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
12. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;

14. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
15. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
16. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;

Dari 16 sub kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 70% hampir seluruhnya capaian fisiknya mencapai 100%. Hanya ada 1 sub kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai target yaitu:

1. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, karena belum optimalnya ketersediaan dan integrasi data sektoral dari perangkat daerah, sehingga proses pengolahan dan analisis data perencanaan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, terjadi penyesuaian prioritas kegiatan perencanaan selama tahun 2025 yang mengakibatkan sumber daya difokuskan pada kegiatan perencanaan yang bersifat wajib dan mendesak.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terserapnya anggaran tersebut sebagai bentuk efisiensi mengingat target kinerja baik output kegiatan maupun outcome program sebagian besar telah tercapai.

Secara rinci realisasi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Bappeda dan Litbang tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4
REALISASI ANGGARAN (Akuntabilitas Keuangan) BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TA. 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11.834.833.344,00	10.133.383.753,00	85,62%
			PERENCANAAN	11.617.423.344,00	9.949.468.118,00	85,64%
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappeda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.168.275.644,00	8.393.285.209,00	91,55%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.488.000,00	43.029.000,00	81,98%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.822.000,00	21.194.000,00	82,08%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.710.000,00	5.025.000,00	88,00%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.710.000,00	5.465.000,00	95,71%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.140.000,00	2.345.000,00	74,68%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.280.000,00	3.605.000,00	84,23%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.826.000,00	5.395.000,00	68,94%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.194.770.080,00	4.741.971.647,00	91,28%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.069.604.092,00	4.618.531.647,00	91,10%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116.375.988,00	115.454.000,00	99,21%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.790.000,00	7.986.000,00	90,85%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.510.000,00	4.110.000,00	74,59%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.510.000,00	4.110.000,00	74,59%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137.199.000,00	97.483.826,00	71,05%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.820.000,00	41.400.000,00	99,00%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.676.000,00	14.968.000,00	39,73%
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	57.703.000,00	41.115.826,00	71,25%

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.003.972.850,00	846.578.869,00	84,32%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.444.450,00	24.644.450,00	96,86%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.046.400,00	161.841.400,00	99,87%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.529.000,00	15.529.000,00	100,00%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.233.000,00	181.508.000,00	92,50%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.900.000,00	57.559.000,00	74,85%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.150.000,00	9.810.000,00	96,65%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.805.000,00	25.930.000,00	96,74%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490.865.000,00	369.757.019,00	75,33%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.372.375.800,00	1.348.607.649,00	98,27%
			Pengadaan Mebel	98.484.000,00	96.836.400,00	98,33%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.273.891.800,00	1.251.771.249,00	98,26%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	608.089.914,00	581.304.391,00	95,60%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.938.850,00	138.137.831,00	93,37%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	460.151.064,00	443.166.560,00	96,31%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	793.870.000,00	730.199.827,00	91,98%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.680.000,00	68.070.300,00	88,77%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.870.000,00	182.096.743,00	84,35%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.280.000,00	62.440.000,00	74,98%

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	418.040.000,00	417.592.784,00	99,89%
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.705.694.700,00	968.064.610,00	56,75%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.439.231.700,00	868.292.910,00	60,33%
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	161.062.100,00	63.489.478,00	39,42%
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	138.964.900,00	42.716.000,00	30,74%
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	208.760.400,00	109.380.500,00	52,40%
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	27.679.000,00	21.227.400,00	76,69%
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	902.765.300,00	631.479.532,00	69,95%
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	86.225.000,00	49.024.600,00	56,86%
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.269.000,00	1.565.400,00	10,25%
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	70.956.000,00	47.459.200,00	66,89%
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	180.238.000,00	50.747.100,00	28,16%
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota	93.518.000,00	20.375.400,00	21,79%
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	86.720.000,00	30.371.700,00	35,02%

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	743.453.000,00	588.118.299,00	79,11%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	360.096.000,00	230.522.566,00	64,02%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72.820.000,00	56.788.800,00	77,99%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.600.000,00	11.170.000,00	88,65%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.150.000,00	1.650.000,00	52,38%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	94.447.000,00	48.514.044,00	51,37%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.497.000,00	27.259.000,00	57,39%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.600.000,00	11.420.000,00	90,63%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.386.000,00	1.736.000,00	51,27%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	113.596.000,00	71.984.722,00	63,37%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	166.477.000,00	160.635.586,00	96,49%

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.210.000,00	57.054.200,00	93,21%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	19.624.000,00	19.513.994,00	99,44%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.682.000,00	33.368.900,00	99,07%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	23.461.000,00	22.198.492,00	94,62%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	216.880.000,00	196.960.147,00	90,82%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.038.000,00	33.033.600,00	99,99%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.600.000,00	11.154.000,00	88,52%

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	85.413.000,00	83.307.247,00	97,53%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.443.000,00	32.665.800,00	76,96%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.600.000,00	9.899.000,00	78,56%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.150.000,00	1.478.500,00	46,94%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	25.986.000,00	23.772.000,00	91,48%
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	217.410.000,00	183.915.635,00	84,59%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	217.410.000,00	183.915.635,00	84,59%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	62.474.000,00	57.421.108,00	91,91%
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	62.474.000,00	57.421.108,00	91,91%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	48.436.000,00	31.090.000,00	64,19%
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	48.436.000,00	31.090.000,00	64,19%

LKIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	106.500.000,00	95.404.527,00	89,58%
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.000.000,00	89.004.527,00	89,00%
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6.500.000,00	6.400.000,00	98,46%

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Seruyan (data diolah)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2025, disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2025 tercermin melalui pencapaian sasaran strategis organisasi yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah 4 (empat) indikator dengan capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata 93,52% atau berpredikat sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan upaya pencapaian target yang telah dilakukan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan cukup maksimal dan EFEKTIF. Sedangkan pada aspek akuntabilitas keuangan, penyerapan anggaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan sebesar 85,62%. Tidak terserapnya anggaran yang sebesar 14,38% tersebut merupakan bentuk EFISIENSI anggaran mengingat seluruh kinerja outcome dan output sebagian besar telah tercapai. Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2025 muncul beberapa permasalahan/hambatan. Meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik dengan mengurangi faktor penghambat pelaksanaan baik dari segi pencapaian yang bersifat finansial maupun personil (SDM) pelaksana program dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi. Selain itu perlu juga memperhatikan upaya meminimalisir faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi setiap kebijakan dan pelaksanaan program guna melaksanakan kinerja positif instansi sesuai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan tupoksi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam perencanaan pembangunan pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang yang merupakan tantangan bagi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan agar terus berupaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun strategi peningkatan kinerja yang dapat diupayakan antara lain:

1. Penguatan manajemen kinerja organisasi melalui peningkatan kompetensi ASN perencana dan peneliti, penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja internal.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui optimalisasi forum koordinasi perencanaan (musrenbang, forum perangkat daerah, dll), penguatan sinergi program lintas perangkat daerah dan lintas sektor, harmonisasi perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penguatan konsistensi antara dokumen RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, peningkatan kualitas perumusan indikator kinerja yang SMART dan terukur, pemanfaatan data sektoral dan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perencanaan dan peningkatan kapasitas SDM perencana melalui bimbingan teknis dan pendampingan.
4. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
5. Peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, riset dan inovasi melalui penyusunan rencana kelitbang berbasis isu strategis daerah, penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, melaksanakan diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan.

Diharapkan dengan melaksanakan strategi tersebut, dapat meningkatkan kinerja Pegawai di lingkup BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan. Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Seruyan disusun, dan semoga memberi manfaat bagi yang berkepentingan.

Kuala Pembuang, 6 Pebruari 2026



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014